



SM/Agung PW

**AKSI KEPRIHATINAN** : Civitas academica Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggelar aksi keprihatinan karena konflik Polri dan KPK yang terus memanas. (52)

## Akademisi Sampaikan "Save KPK, Save Polri"

YOGYAKARTA - Keprihatinan atas rivalitas KPK dan Polri muncul dari kalangan akademisi. Kemarin, akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar aksi di kampus masing-masing, menyampaikan sikap penyelamatan KPK, penyelamatan Polri, dan terutama penyelamatan Indonesia.

Di kampus Fakultas Hukum UII di Jalan Taman Siswa, dosen, pekerja dan mahasiswa mengikuti jalannya aksi keprihatinan. Dekan FH, Dr Aunur Rohim Faqih SH MHum memimpin langsung aksi tersebut, dan membacakan pernyataan sikap.

"Bebaskan Polri dan KPK dari politisasi. Keduanya merupakan lembaga penegak hukum yang harus netral dari berbagai kepentingan politik. Perseteruan kedua lembaga sejatinya tidak perlu terjadi jika anasir politik tak masuk ke dalamnya. Kedua lembaga hukum ini harus dikuatkan bukan dilemahkan atau malah dihancurkan," tandas Aunur di

depan sivitas akademika.

Aksi di depan kampus FH berlangsung sejak pagi. Mahasiswa selain menggelar orasi juga menyediakan spanduk tanda tangan dukungan untuk penyelamatan KPK dan Polri. Mereka meminta pemerintah tegas menyingkirkan kepentingan politik dari tubuh kedua lembaga.

Aunur juga minta polemik Polri dan KPK segera diakhiri karena hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi upaya penegakan hukum. Ketika keduanya ribut berpolemik, koruptor akan bebas menggarong uang negara karena tak ada lagi yang memperhatikan.

### Harus Kritis

"Rakyat harus tetap kritis, dan senantiasa mendorong terciptanya stabilitas hubungan kelembagaan dua ujung tombak pemberantasan korupsi tersebut," tegasnya.

Di depan massa aksi, ia meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah tepat dan tegas mengakhiri polemik. Presiden adalah kepala negara berwenang dan bertanggung

jawab penuh atas kondisi negara dan agenda pemberantasan korupsi.

Menurutnya dengan kewenangannya, Presiden harus mengambil langkah konkrit agar semuanya bisa menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada. Ia menyerukan Polri harus kuat, begitu pula KPK. Rakyat menunggu kerja mereka untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan lainnya.

Di UMY, akademisi juga menyampaikan keprihatinan dan mendesak Presiden segera mengambil langkah untuk mengakhiri konflik yang berdampak tidak produktif bagi seluruh rakyat. Guru bangsa, Syafii Maarif yang masuk menjadi tim independen untuk menyelesaikan kasus itu mengatakan anggota tim berisi orang-orang baik dan komit dengan penegakan hukum.

Ia merespons positif langkah Presiden membentuk tim independen, bahkan menurutnya tindakan tersebut sudah benar. Mereka bisa bekerja maksimal asalkan tidak "dik-erangkeng". (D19-52)